

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat

Mita Sundari, Nia Sumiati, Muhammad Syukrullah

Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung,
Bandung

Email : mita.sundari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas yang ada di instansi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 36 responden berasal dari pegawai pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja yang ada pada instansi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Dengan memastikan kualitas laporan keuangan yang baik, instansi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka kepada publik. Ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Laporan Keuangan, Pemerintahan

ABSTRACT

This study aims to determine the quality of financial reports and their influence on accountability in government agencies in West Bandung Regency. The research method used is quantitative method. The sample used was 36 respondents from government employees in West Bandung Regency. The research results obtained are that the quality of financial reports has an influence on performance accountability in government agencies in West Bandung Regency. By ensuring good quality financial reports, government agencies in West Bandung Regency can improve their performance accountability to the public. This will help build public trust and ensure more effective and efficient use of public funds.

Keywords : *Financial Report Quality, Governance, Performance Accountability*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan merupakan instansi yang mempunyai wewenang untuk mengatur Negara. Pemerintahan juga merupakan wujud nyata sebagai dalam mengatur pembangunan Negara. Sebuah pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang mampu menjadi birokrat yang baik bagi masyarakatnya (Sulistyan & Ermawati, 2020). Adanya birokrasi yang jelas akan memberikan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Ali and Saputra (2020) menyebutkan bahwa pemerintahan merupakan

wujud nyata dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang diharapkan oleh setiap bangsa. Pemerintahan yang baik tentu akan memiliki prosedur yang jelas terutama pemerintahan yang berlandaskan kebutuhan masyarakat. Sunarso (2023) menyebutkan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengevaluasi kinerja yang diselenggarakan atas nama rakyat. Kegiatan setiap pemerintahan dilakukan berdasarkan intelektual yang relevan sebagai bentuk mencapai pemerintahan yang baik. Kinerja pemerintahan dilakukan berdasarkan kewajiban sebagai wakil rakyat.

Arsyad and Karisma (2022) menyebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan harus memiliki sebuah sistem, mekanisme, atau pola yang jelas dan terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi pelaksanaan. Mekanisme penyelenggaraan yang jelas dalam pemerintahan sangat diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat merupakan subjek utama dalam tujuan dibentuknya suatu pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dan Negara. Pemerintahan juga mempunyai kebijakan dan wewenang untuk mengatur suatu daerah, oleh karenanya dibentuk sebuah pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah merupakan bentuk pemerintahan yang mempunyai otonomi tersendiri untuk mengatur, menjalankan, dan mengevaluasi sesuai daerahnya masing-masing. Bahkan pentingnya pemerintahan daerah atau desa dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan dalam ruang lingkup daerah atau desa diharapkan mampu mengelola kinerja pemerintahan secara lebih rinci dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi desa masing-masing dengan penuh tanggungjawab (Hajar et al., 2021).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban dengan penuh tanggungjawab. Pegawai pemerintahan berkewajiban melaksanakan kinerja untuk mengatur dan mengelola daerah sebagai bentuk mencapai kesejahteraan daerah dan

masyarakatnya (Nartin & Musin, 2022). Banyak hal-hal sensitif yang dikerjakan oleh pemerintah yang menjadi perhatian oleh masyarakat. Salah satu kinerja yang menjadi perhatian oleh masyarakat yaitu tata kelola keuangan yang ada dalam pemerintahan.

Keuangan merupakan hal yang sangat sensitif, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari melainkan dalam pemerintahan. Pemerintahan memiliki tugas dan kewajiban terkait pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah memiliki berbagai pemasukkan keuangan yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat dan daerah, mulai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasar hal tersebut pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya masing-masing dengan penuh tanggungjawab. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan secara transparansi dan tanggungjawab dalam laporan keuangan (Mbipi et al., 2021).

Adanya bentuk transparansi dan tanggungjawab pada pengelolaan keuangan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintahan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan perspektif negatif dari masyarakat terhadap pemerintah. Bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kualitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan (Sari & Halmawati, 2021). Pengelolaan keuangan sudah diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan oleh pemerintah diatur dan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang sesungguhnya. Laporan keuangan dalam pemerintahan pusat maupun daerah harus dilaksanakan dengan penuh ketelitian dan transparansi. Laporan keuangan pemerintah disusun dan diisi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN dan penggunaan keuangan APBD. Laporan tersebut disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi pemerintahan (Mulia, 2019). Standar akuntansi sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab yang sesuai standar. Adapun peraturan yang mengatur laporan keuangan pemerintah yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan disusun dan ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaksana pengelola keuangan pada pemerintahan. Standar Akuntansi tersebut sebagai landasan dan pedoman pemerintah dalam menyusun laporan perjanggjawaban keuangan pemerintahan. Adanya Standar Akuntansi tersebut juga bertujuan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah pusat maupun daerah yang telah mengelola keuangan. Laporan keuangan pemerintahan daerah dilakukan secara satu kali dalam setahun.

Laporan keuangan merupakan bentuk dari akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan. Akuntabilitas merupakan tanggungjawab. Akuntabilitas merupakan salahsatu prinsip tata kelola dalam keuangan pemerintahan (Aziiz & Prastiti, 2019). Oleh karena itu, pemerintahan yang memegang teguh peraturan dalam penyusunan laporan keuangan tentu memiliki akuntabilitas yang baik. Begitupun sebaliknya, pemerintahan yang memiliki akuntabilitas yang baik maka kualitas laporan keuangan pemerintahan juga baik.

Berdasarkan pentingnya kualitas laporan keuangan yang dijalankan dalam pemerintahan daerah akan mempengaruhi tingkat akuntabilitas pemerintahan. Pemerintahan berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah berdasarkan landasan dan standar laporan keuangan yang berlaku sebagai bentuk transparansi. Setiap keuangan yang dikelola dan digunakan oleh pemerintah harus disusun secara teliti untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas yang ada di instansi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.

2. METODE

Metode penelitian pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan proses pengumpulan data, pengolahan data, serta penyajian data secara statistic atau angka. Data penelitian kuantitatif merupakan data yang ada diperoleh dilapangan dalam bentuk angka (Paramita et al., 2021). Data yang dihasilkan berdasarkan data populasi dan sampel yang merupakan subjek utama pada penelitian ini. Responden penelitian ini yaitu berjumlah 36 orang yang berasal dari seluruh instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kriteria responden adalah pegawai yang memiliki kemampuan dalam membaca laporan keuangan.

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menggeneralisasikan hasil temuan yang ada dilapangan berdasarkan populasi yang ada (Basuki, 2016). Selain itu, penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya melalui variabel-variabel penelitian. Variabel tersebut adalah variabel kualitas laporan keuangan dan variabel akuntabilitas kinerja. Pada penelitian yang dilakukan akan diketahui keterhubungan atau pengaruh antar variabel tersebut dalam bentuk sajian numeric atau angka. Data yang dihasilkan dari setiap variabel dilakukan melalui penyebaran angket dalam bentuk penilaian Skala Likert dari rentang “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”. Data yang diperoleh akan diolah dan diuji kevalidan dan keabsahannya, sehingga akan menghasilkan data yang sesuai dengan hipotesis.

Pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintahan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui laporan keuangan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat berdasarkan data yang ada dilapangan. Data yang dapat dikumpulkan terkait kualitas laporan keuangan memiliki beberapa indikator. Indikator tersebut diadaptasi dari penelitian Ikyarti and Aprila (2019). Indikator kualitas laporan keuangan berdasarkan kebutuhan penelitian, yaitu 1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan yaitu laporan disusun dan disajikan berdasarkan pedoman SAP pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. 2) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yaitu sistem yang digunakan sebagai media transparansi yang dapat dibagikan kepada masyarakat. 3) Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), yaitu proses suatu tindakan pengawasan yang dari pimpinan dan pegawai pemerintahan terkait pelaporan keuangan yang handal, pengamanan asset Negara, efektifitas dan efisiensi, serta ketaatan terhadap peraturan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008.

Pengukuran Akuntabilitas Kinerja pemerintahan merupakan penilaian yang dilakukan terkait tingkat akuntabilitas kinerja yang ada pada pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pengukuran akuntabilitas kinerja pemerintahan memiliki indikator-indikator sebagai acuan dalam pengumpulan data. Indikator dalam pengukuran akuntabilitas mengacu pada Aziiz. Indikator pada penelitian ini ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian, seperti 1) relevansi, yaitu laporan keuangan yang disajikan

memiliki kesesuaian. 2) Dapat dibandingkan, kinerja pada laporan keuangan berdasarkan pedoman yang berlaku. 3) Andal, menyajikan laporan keuangan dengan penuh tanggungjawab. 4) Mudah dipahami, laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh masyarakat.

Pengukuran kualitas laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat merupakan penilaian ketercapaian indikator pada setiap variabel penelitian. Penilaian tersebut dihasilkan dari responden penelitian melalui penyebaran angket dilapangan. Hasil data yang diperoleh akan dikumpulkan, diolah, dan disajikan secara statistik. Hasil data akan di analisis secara deskriptif, diuji kevalidan dan reliabilitasnya. Oleh karena itu, data yang telah diolah akan menghasilkan data berdasarkan hipotesis yang telah ditentukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Responden	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	16	44%
Perempuan	20	56%
Usia:		
18 – 26 Tahun	7	19%
27 – 35 Tahun	12	33%
36 – 44 Tahun	11	31%
> 44 Tahun	6	17%
Masa Kerja		
1 – 5 Tahun	11	31%
6 – 10 Tahun	14	39%
> 10 Tahun	11	31%

Sumber: Data diolah (2023)

Pada penelitian ini, responden didominasi oleh perempuan sebesar 56% atau 20 orang. Pada kategori usia, didominasi oleh responden dengan rentang usia 27-35 tahun sebanyak 33% atau 12 orang. Kemudian pada kategori masa kerja didominasi oleh pekerja dengan masa kerja 6-10 tahun sebanyak 39% atau 14 orang.

Uji Validitas

Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0.3291), artinya variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	r hitung	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan		
X.1	0,869	Valid
X.2	0,894	Valid
X.3	0,690	Valid
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		
Y.1	0,707	Valid
Y.2	0,772	Valid
Y.3	0,876	Valid
Y.4	0,759	Valid

Sumber: Data diolah (2023)

Uji Reliabilitas

Pada uji reliabilitas seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha $>$ 0.600, maka dari itu variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan reliabel.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria
Kualitas Laporan Keuangan	0,756	0,600
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	0,775	0,600

Sumber: Data diolah (2023)

Uji Normalitas

Berdasarkan tabel 4, diperoleh hasil pengujian bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200. Dari hasil pengujian diketahui bahwa data berdistribusi normal karena memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $>$ 0.05.

Tabel 4. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
	N	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28555354
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.069
	Negative	-.101
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah (2023)

Uji Linearitas

Uji linearitas memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat apakah memiliki hubungan yang linear atau tidak. Dari tabel 5 diketahui bahwa nilai Deviation from linearity > 0.05 , maka dari itu pengujian dapat dilakukan pada uji regresi linear.

Tabel 5. Uji Linearitas

			Sum of Squares	df	Sig.
Kinerja *	Between	(Combined)	156.468	9	0.011
Kualitas	Groups	Linearity	118.724	1	0.000
		Deviation from Linearity	37.744	8	0.572
	Within Groups		145.087	26	
	Total		301.556	35	

Sumber: Data diolah (2023)

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari tabel 6. diperoleh nilai R Square sebesar 0,656, artinya variabel Kualitas Laporan Keuangan dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebesar 65,6%.

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,810	0,656	0,656	2,31892

Sumber: Data diolah (2023)

Uji Regresi Linear

Dengan persamaan regresi $Y = a + bX$ diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 7. Uji Regresi Linear

Variabel	Koefisien Regresi	Std. Error	T Statistics	Sig.
Konstanta	4,265	2,084	2,046	0,049
Kualitas Laporan Keuangan	0,882	0,188	4,699	0,000

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 7, maka regresi linear yang terjadi adalah $Y = 4,625 + 0,882X$ artinya:

- Apabila Kualitas Laporan Keuangan bernilai nol, maka koefisien regresi untuk Akuntabilitas Kinerja Pemerintah secara konstan adalah sebesar 4,265.
- Apabila Kualitas Laporan Keuangan mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka Akuntabilitas Kinerja Pemerintah akan naik sebesar 0,882.

Uji Hipotesis-Uji T

Pada uji hipotesis, apabila suatu hipotesis memiliki nilai sig. $< 0,05$ maka hipotesis tersebut dapat diterima. Berdasarkan tabel 7 pada uji regresi linear, diperoleh hasil bahwa Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai sig. sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. **Ha diterima.**

Pembahasan

Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Kualitas laporan keuangan yang tinggi akan meningkatkan transparansi pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan dan penggunaan dana publik. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai bagaimana dana publik digunakan

dan mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan. Laporan keuangan yang akurat dan lengkap akan memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana publik. Dengan memiliki laporan keuangan yang baik, pemerintah akan dapat memberikan penjelasan yang jelas tentang penggunaan dana publik dan hasil yang dicapai. Kualitas laporan keuangan yang baik akan memfasilitasi evaluasi kinerja pemerintah. Laporan tersebut akan memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur pencapaian tujuan kebijakan, membandingkan kinerja dengan target yang telah ditetapkan, dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Laporan keuangan yang transparan dan berkualitas tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, pemerintah akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam mengelola dana publik dan menjalankan tugas-tugas pemerintahannya.

Kualitas laporan keuangan memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Akuntabilitas kinerja mengacu pada kewajiban instansi pemerintahan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan penggunaan sumber daya publik. Berikut adalah beberapa cara di mana kualitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas kinerja yaitu 1) Laporan keuangan yang baik akan memberikan transparansi tentang bagaimana sumber daya publik digunakan. Ini termasuk informasi tentang pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Dengan adanya laporan keuangan yang transparan, instansi pemerintahan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat. 2) Laporan keuangan yang berkualitas tinggi harus memenuhi prinsip keandalan, seperti kejujuran, objektivitas, dan akurasi. Informasi yang akurat dan andal akan memberikan gambaran yang tepat tentang kinerja keuangan instansi pemerintahan, memungkinkan penilaian yang obyektif terhadap pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya. 3) Laporan keuangan yang baik juga mencerminkan adanya pengendalian internal yang efektif dalam instansi pemerintahan. Pengendalian internal yang kuat dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas instansi pemerintahan. 4) Laporan keuangan yang berkualitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja instansi pemerintahan. Informasi yang terdokumentasi dengan baik dalam laporan keuangan memungkinkan perbandingan antara kinerja aktual dan target yang ditetapkan. Dengan

demikian, instansi pemerintahan dapat mengukur pencapaian tujuan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

4. SIMPULAN

Kualitas Laporan Keuangan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam kemajuan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Saran yang dapat diberikan untuk kemajuan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah dengan memperbaiki mekanisme pelaporan keuangan dan meningkatkan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses yang mudah dan memahami laporan keuangan yang disajikan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. Melalui pelatihan dan pendidikan yang tepat, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan laporan keuangan yang lebih dapat diandalkan. Selain itu juga dapat meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintahannya. Dengan memiliki sistem yang efektif dan efisien, pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan keuangan daerah. Saran tambahan berupa jalinan kerjasama dengan pihak eksternal, seperti auditor independen atau lembaga akademik, untuk melakukan audit atau penilaian terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Hal ini dapat memberikan perspektif independen dan mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan analisis kualitas laporan keuangan pada daerah lain yang ruang lingkupnya lebih luas dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Variabel yang digunakan dalam diharapkan lebih luas sehingga dapat dilakukan penerapan yang lebih akurat dalam mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Arsyad, J. H., & Karisma, D. (2022). *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Sinar Grafika.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. J. J. A. A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.
- Basuki, U. (2016). Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 13(2), 55-82.
- Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora*, 6(1), 136-142.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131-140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE Accounting and Financial Review*, 3(2), 152-158.
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal El-Riyasah*, 9(1), 7-21.
- Nartin, & Musin, Y. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Sibatik Jurnal*, 1(3), 163-172. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.23>
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*. Widya Gama Press.
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1-11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>
- Sulistyan, R. B., & Ermawati, E. (2020). *Perilaku Cyberloafing di Kalangan Pegawai*. Widya Gama Press.
- Sunarso, H. S. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).